



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 18 Maret 2025/Periodik - 2024)

Status Verifikasi Administratif Lengkap

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIT KERJA : UNIVERSITAS GADJAH MADA

I. DATA PRIBADI

1. Nama : KARLINA
2. Jabatan : KETUA PROGRAM SARJANA PROGRAM STUDI TEKNIK SIPIL (PAW)
3. NHK : 962752

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN **Rp.** **1.560.000.000**

1. Tanah Seluas 150 m2 di KAB / KOTA SLEMAN, HASIL SENDIRI
Rp. 305.000.000
2. Tanah dan Bangunan Seluas 121 m2/70 m2 di KAB / KOTA
SLEMAN, HASIL SENDIRI Rp. 755.000.000
3. Tanah Seluas 460 m2 di KAB / KOTA PATI, HASIL SENDIRI Rp.
500.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN **Rp.** **149.000.000**

1. MOTOR, HONDA VARIO Tahun 2017, HASIL SENDIRI Rp.
9.000.000
2. MOBIL, TOYOTA SIENTA Tahun 2018, HASIL SENDIRI Rp.
140.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA **Rp.** **----**

D. SURAT BERHARGA **Rp.** **----**

E. KAS DAN SETARA KAS **Rp.** **658.322.360**

F. HARTA LAINNYA **Rp.** **----**

Sub Total **Rp.** **2.367.322.360**

III. HUTANG **Rp.** **----**

IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III) **Rp.** **2.367.322.360**

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan



dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.